

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2022, Forum Ekonomi Dunia atau *World Economic Forum* (WEF) menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman teratas bagi masa depan umat manusia (World Economic Forum, 2022). Hal ini dipicu oleh degradasi sumber daya alam, ekosistem, serta penurunan keanekaragaman hayati yang terjadi di dunia. Sejak revolusi industri, aktivitas manusia semakin merusak hutan, padang rumput, lahan basah, dan laut, sehingga mengancam kehidupan dan kesejahteraan manusia. Diperkirakan 75 persen bentang alam di Bumi telah diubah secara signifikan. Selama 50 tahun terakhir, populasi mamalia, burung, amfibi, reptil, dan ikan mengalami penurunan rata-rata 70 persen (Almond et al., 2020). Secara global, 93 persen anak tinggal di lingkungan dengan tingkat polusi udara di atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) (Pollution, 2018). Untuk mengatasi itu semua, tindakan konservasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak bagi keberlanjutan kehidupan di planet bumi (Alikodra, 2021).

Konservasi terkait erat dengan pemikiran ekologi modern dan telah menjadi faktor penting dalam setiap pengambilan kebijakan selama dua abad terakhir sejak tahun 1990-an (abad ke-20) hingga 2000-an (abad ke-21) (Keppel et al., 2015; Klein et al., 2009). Pengetahuan Barat atau materialistis mengenai pengelolaan sumber daya alam secara signifikan meningkatkan produktivitas tetapi tidak dapat menjamin stabilitas atau keberlanjutan. Namun di sisi lain, pengetahuan ekologi tradisional atau *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) yang dikembangkan oleh

masyarakat adat secara bertahap diakui secara global karena mendukung konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan (Das et al., 2023). TEK merupakan 'kumpulan pengetahuan, praktik, dan kepercayaan kumulatif, yang berkembang melalui proses adaptif dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui transmisi budaya, tentang hubungan makhluk hidup (termasuk manusia) satu sama lain dan dengan lingkungannya' (Robbins & Berkes, 2000). Misalnya, 'tabu sosial' atau 'pantang larang' dalam sebuah sistem kepercayaan atau agama yang membuat peraturan terkait pengelolaan situs sakral, yang seringkali berujung pembatasan kegiatan tertentu untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan layanan yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan (Berkes et al., 2000; Colding & Folke, 2001; Klepeis et al., 2016). Praktik konservasi oleh masyarakat tradisional di seluruh dunia ini telah dilakukan sejak ratusan tahun lalu (Malhotra et al., 2001).

Salah satu produk dari TEK yang terkenal adalah Situs Sakral Alami (SSA) atau *Sacred Natural Site* (SNS). Dalam konteks situs alam yang sakral, bukan berarti tidak memiliki pengaruh, hubungan, atau interaksi dengan manusia. Kata 'situs' mencakup konsep yang luas, berupa wilayah atau tempat dalam sebuah bentang alam, atau bahkan sebuah batu atau pohon tunggal (Verschuuren, McNeely, et al., 2012). Mereka tidak hanya menyediakan kebutuhan agama dan sosial budaya masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi jasa ekosistem yang penting, mulai dari pengaturan udara, kualitas air dan iklim mikro, hingga konservasi keanekaragaman hayati yang berdampak bagi masyarakat (Wassie et al., 2010; Yuan & Liu, 2009). SSA dapat ditemukan di semua benua berpenghuni (Hughes & Chandran, 1998), bahkan hutan rimba sakral sudah ada sejak manusia

belum mengenal sistem pertanian (Hughes & Chandran, 1998). Mereka terkait dengan berbagai keyakinan atau kepercayaan, sistem sosial budaya, institusi hingga ritual, dan tentunya dapat mengalami perubahan kondisi (Verschuuren, McNeely, et al., 2012).

Sejak lama, peran SSA telah diakui dalam konservasi keanekaragaman hayati (Gadgil & Vartak, 1976; Haridasan & Rao, 1985; Kosambi, 1962). SSA juga sejak lama mendapat perhatian dari kalangan ahli biologi konservasi, karena mulai banyaknya ancaman dari berbagai aktivitas antropogenik (Gao et al., 2013; Pimm et al., 1995). Ada banyak SSA yang dapat bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun, sementara yang lain menghadapi ancaman serius bahkan hilang karena eksploitasi sumber daya alam yang merusak (S.A. Bhagwat & Rutte, 2006; Chandrakanth et al., 2004). Indonesia yang memiliki 1340 suku (Melalatoa, 1995), juga memiliki potensi beragam SSA yang dapat dijadikan sebagai alternatif kawasan konservasi, bahkan beberapa telah terbukti mampu menyelamatkan hutan tersisa di wilayah tersebut. Sebagai contoh, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kramat Jaya dan Sukanegara di Banten, yang menjaga kelestarian hutan mereka dengan metode pengkeramatan serta berbagai mitos (Royyani, 2012). Ada juga kawasan keramat Suku Bajo, yang terbukti efektif dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Wakatobi (Hasrawaty et al., 2017). Di bagian Timur Indonesia, ada Suku Kokoda, Kepulauan Ugar, Papua Barat, yang memiliki hutan keramat sebagai bentuk konservasi di tingkat ekosistem (Saputra, 2021), serta beragam contoh praktik pengkeramatan yang berimplikasi pada terjaganya hutan dari ancaman kerusakan antropogenik (Aulia & Dharmawan, 2010; Dassir, 2008; Hamidi et al., 2022; Sihite et al., n.d.; Usop, 2020). Eksistensi

berbagai kearifan serta praktik sakralisasi oleh masyarakat lokal juga mampu menjaga kelestarian sumber mata air (Siswadi et al., 2011), yang menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Mengenai hal ini juga disampaikan melalui berbagai mitos atau cerita rakyat, yang bermuara pada terciptanya sebuah kepercayaan dan semangat kolektif dalam menjaga alam (Fitrianita et al., 2018). Berbagai produk pengetahuan masyarakat adat ini diperoleh melalui pengalaman empirik mereka dalam merespon fenomena alam, serta mempunyai nilai sosial, budaya dan identitas yang sangat melekat pada kehidupan mereka (Kasitowati, 2011).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki Suku Mapur yang terkenal kaya dengan berbagai kearifan dalam mengelola alam (Cholillah, 2017). Mereka menganggap gunung, hutan, sungai, laut, langit, hewan dan tumbuhan, merupakan bagian dari alam semesta, menyatu dengan roh nenek moyang mereka, sehingga harus dihormati (Abdillah, 2019). Suku Mapur ini adalah sub Suku Melayu tua yang telah hidup selama ratusan tahun di lanskap hutan perbukitan hingga pesisir, di ujung Utara Pulau Bangka yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Menurut Teungku Sayyid Deqy, (2014), kawasan ini mereka sebut sebagai 'Karang Lintang'. Sebuah wilayah adat yang membentang dari Mapur - Tuing (Selatan), Aik Abik-Gunung Muda (Barat), Pejem (Timur) hingga Simpang Tiga (Utara). Jika dihubungkan dengan garis, bentuknya jajaran genjang. Titik tengahnya Gunung Pelawan, sementara Gunung Maras (gunung tertinggi di Bangka Belitung) merupakan titik spiritual mereka, dan dijadikan sebagai arah makam leluhur. Dalam kepercayaan Suku Mapur, karang lintang ini merupakan 'benteng' yang melindungi Suku Mapur dari ancaman dunia luar.

Dalam dunia kosmologi Suku Mapur, juga terdapat sejumlah wilayah yang disakralkan atau disucikan, dibalut dengan kearifan atau larangan guna melindungi wilayah tersebut. Mereka percaya, jika ada yang melanggar atau merusak kawasan tersebut, maka akan terkena bala (bencana), penyakit, bahkan meninggal dunia. Kawasan sakral Suku Mapur tersebut mereka sebut sebagai ‘rahasia pelawan’, yaitu Rebang Telang (pintu gerbang air), Bukit Kasak Tade, Tujuh Mata Kakap, Bukit Tabun, serta Gunung Cundong. Semuanya berwujud kawasan hutan perbukitan, yang sebagian besar berada di tengah kawasan Karang Lintang.

Sementara di pesisir Tuing, terdapat sejumlah situs sakral alami yang terkait dengan legenda Akek Antak, sosok yang dihormati oleh Suku Mapur. Semua situs ini berbentuk batu granit, di antaranya Batu Telapak Kaki Akek Antak, Batu Pare Akek Antak, Batu Sabak, dan Batu Gendang. Semua situs ini sangat penting bagi kehidupan Suku Mapur, dan terkait dengan beragam ritual, serta menyangkut stabilitas sosial-budaya hingga spiritual Suku Mapur.

Ironinya, sejumlah situs sakral tersebut menjadi kawasan ‘hutan tersisa’ Suku Mapur saat ini. Dalam sejumlah laporan (Ismi, 2020a; Wijaya, 2022b, 2022a), wilayah yang mereka sebut sebagai ‘rahasia pelawan’, kini dikelilingi oleh hamparan perkebunan sawit yang dibuka sejak tahun 2006. Sementara kondisi sosial-budaya masyarakat Suku Mapur hari ini terus mengalami pergeseran, dimana sebagian besar masyarakat terpaksa beralih profesi menjadi penambang timah, meninggalkan tradisi behume atau berkebun yang telah menghidupi mereka selama turun-temurun (Cholillah, 2015).

Tergerusnya kawasan hutan Suku Mapur, tidak terlepas dari berbagai pengaruh rezim pemerintahan yang pernah menyentuh wilayah adat Suku Mapur.

Mulai dari era kolonialisme Belanda yang menjuluki mereka sebagai ‘Orang Lom’ (orang belum beragama), sehingga berimplikasi pada lahirnya stigma negatif bagi Suku Mapur yang dianggap terbelakang oleh masyarakat umum di Pulau Bangka (Wijaya, 2022b). Hal ini diduga juga berimplikasi terhadap keputusan rezim pemerintah Orde Baru, yang menganggap Suku Mapur sebagai masyarakat terasing, sehingga mereka kemudian direlokasi dari hutan menuju dusun-dusun yang dibentuk oleh pemerintah saat itu. Sejak saat itu, Suku Mapur kehilangan hak atas wilayah adat mereka, dan dianggap sebagai masyarakat pada umumnya, bahkan cenderung tertinggal. Hingga saat ini belum ada satupun kawasan adat Suku Mapur yang diakui oleh negara. Ribuan hektar hutan di kawasan Karang Lintang berubah menjadi hamparan perkebunan sawit serta lubang tambang. Semua ini diduga tidak terlepas dari berbagai perubahan situasi ekonomi-politik yang dilakukan oleh sejumlah rezim pemerintahan (Janawi & Islam, n.d.; Wijaya, 2022b; Zulkarnain, n.d.; Zulkarnain et al., 2018).

Apa yang terjadi pada Suku Mapur, juga tercermin pada kondisi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum. Selama berabad-abad, Bangka Belitung hanya dipandang sebagai objek eksploitasi, mulai dari tambang mineral, sawit, perkebunan, hingga kegiatan budidaya udang yang semakin berkembang di sejumlah kawasan pesisir (Bidayani et al., 2017; I. Ibrahim, 2015; M. S. Ibrahim et al., 2018; K. Kurniawan et al., 2014; Swastiwi et al., 2017; Wijaya, 2022b). Berbagai tekanan antropogenik ini meninggalkan luka mendalam di daratan Bangka Belitung dengan luas sekitar 1,6 juta hektar. Mulai dari luasan kawasan hutan yang dalam kurun waktu enam tahun (2014-2020), telah berkurang seluas 460.000 hektar atau tersisa 197.255 (World Economic Forum, 2022).

Sementara pada tahun 2019 lalu, dari 43 titik pantau pada 11 sungai di Bangka Belitung, 55 persen melebihi baku mutu TSS dan 78 persen melebihi baku mutu. Ini juga mungkin terjadi pada 2.000 lebih sungai dengan panjang 10.514 km di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, 2021b). Hal ini diperparah dengan degradasi hutan mangrove seluas 10.858 hektar, hanya dalam kurun waktu satu tahun (2019-2020) (Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, 2021a).

Situs Sakral Alami (SSA), sebagaimana yang dimiliki Suku Mapur, telah menjadi subjek kajian yang menarik bagi para peneliti (Godbole et al., 2012; Gopal et al., 2018; Hakkenberg, 2008; Oviedo & Jeanrenaud, 2007). Di Yunnan, sebuah provinsi di sebelah barat daya Republik Rakyat Tiongkok, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa ratusan pegunungan di Tibet menjadi wilayah sakral bagi masyarakat sekitar. Selain berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati, pegunungan sakral ini direkomendasikan untuk masuk dalam skema konservasi formal dan sejalan dengan paradigma konservasi modern, karena partisipasi masyarakat yang kuat dalam konservasi gunung sakral tersebut (Anderson et al., 2005; Hakkenberg, 2008; Shen et al., 2012). Praktik konservasi melalui pengetahuan tradisional ini juga harus dibentengi dengan kebijakan konservasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama, karena jangkauannya yang luas bagi generasi hari ini dan masa mendatang (Singh et al., 2023). Situs sakral alami memiliki efek positif pada keanekaragaman hayati di seluruh benua.

Tetapi implikasi positif yang diberikan oleh situs-situs sakral ini perlu pengakuan resmi, terutama terkait kerangka kerja konservasi, sistem tata kelola atau

manajemen yang sesuai dengan ciri khas SSA (Zannini et al., 2021). Pengakuan terhadap nilai konservasi yang ada dalam situs sakral alami juga masih belum diakomodir secara maksimal dalam kebijakan pemerintah daerah (Sinthumule, 2022). Penghormatan dunia terhadap situs sakral alami ini juga masih minim (Barrow, 2022), padahal beragam pengetahuan dari SSA sangat dibutuhkan dan perlu diperluas, karena akan membuka jalan baru dalam pengelolaan konservasi dan perencanaan penggunaan lahan. Dalam hal strategi konservasi, penelitian terkait SSA disarankan untuk mengeksplorasi manajemen atau sistem kolobarotif yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjaga situs tersebut (Tatay Nieto & Merino de Diego, 2023). Dengan demikian, kebutuhan penelitian tentang sistem sosial ekologi dan budaya yang berjalan di SSA masih relevan untuk mendukung pengakuannya dalam penentuan kebijakan konservasi daerah, serta memperkaya pengetahuan dan sistem sosial ekologi dan budaya yang berjalan dalam SSA.

Penelitian spesifik terkait sistem sosial ekologi dan budaya dalam SSA di Indonesia masih minim, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Berbagai situs sakral atau keramat ini sering dibingkai dalam kajian konservasi berbasis kearifan lokal (Mojo et al., 2017; Sinapoy, 2018; Siswadi et al., 2011; Suparmini et al., 2013; Suryadarma, 2008; Usop, 2020; Wenno et al., 2021). Dengan demikian, penelitian tentang sistem sosial ekologi dan budaya dalam SSA mendukung dan melengkapi berbagai penelitian terkait situs-situs sakral alami di Indonesia.

Sementara di Pulau Bangka, hingga saat ini belum ada penelitian spesifik terkait hubungan sistem sosial ekologi dan budaya Suku Mapur dengan situs sakral alami mereka. Sementara penelitian tentang kearifan lokal masyarakat di Pulau

Bangka yang terkait dengan aktivitas tambang timah di Kabupaten Bangka, pernah diteliti oleh Rahayu (2016). Spesifik pada masyarakat Suku Mapur, Cholillah (2017) pernah melakukan penelitian tentang pengetahuan serta pengelolaan hutan Suku Mapur di Dusun Pejam. Informasi terkait situs sakral juga disinggung, akan tetapi objek penelitian lebih berfokus pada praktik pengelolaan hutan secara umum. Pembahasan Suku Mapur yang cukup komprehensif pernah dilakukan oleh Teungku Sayyid Deqy, (2014). Sejumlah situs sakral juga menjadi topik pembahasan, namun belum menyinggung ranah ekologi serta konservasi alam, dan lebih berfokus pada studi sosial-antropologi, filologi, arkeologi sejarah dalam bingkai arus Islamisasi Pulau Bangka. Dalam lingkup lebih luas, penelitian ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya mitigasi krisis iklim global melalui produk-produk kebudayaan, berupa pengetahuan ataupun kearifan dalam mengelola lingkungan (Indrawan, 2022).

Sejauh ini, penelitian terkait pengetahuan Suku Mapur di Dusun Air Abik dengan alam, belum pernah dikaitkan dengan hubungan situs sakral alami dan konservasi lingkungan. Sejumlah penelitian lebih berfokus pada dinamika konflik politik, sosial, budaya dan ekonomi (Cholillah, 2015; Dwi Haryadi et al., 2018; Sulaiman, 2014; Wirazilmustaan et al., 2020; Zulkarnain, n.d.; Zulkarnain et al., 2018). Belum ada penelitian ilmiah tentang Gunung Cundong di Dusun Air Abik, dan kaitannya dalam konservasi dan sistem sosial ekologi dan budaya masyarakat. Karenanya, penelitian ini akan menjadi pelengkap, khususnya terkait pendekatan konservasi di Pulau Bangka, serta terkait pengetahuan Suku Mapur dengan alam. Belum ada penelitian yang menganalisis hubungan sistem sosial ekologi di sejumlah wilayah sakral Suku Mapur, serta dinamikanya dalam periode perubahan

situasi ekonomi-politik dan rezim pemerintahan. Meskipun ada banyak literatur atau penelitian terkait kearifan, serta bagaimana hubungan Suku Mapur dengan alam (Afriyansyah et al., 2013, 2016; Cholillah, 2015, 2017; Janawi & Islam, n.d.; Sulaiman, 2014; Teungku Sayyid Deqy, 2014; Wirazilmustaan et al., 2020; Zulkarnain, 2014; Zulkarnain et al., 2018).

Jawaban atas pertanyaan bagaimana wilayah sakral tersebut masih terjaga di tengah masifnya ancaman antropogenik, dapat bermanfaat untuk konservasi alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menjadi penting, mengingat kawasan konservasi pemerintah, seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, serta kawasan lindung pemerintah lainnya, sama sekali tidak menjamin kelestarian hutan di Bangka Belitung. Ini diperkuat dengan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa-Cerucuk 2019, dimana total lahan kritis di Bangka Belitung mencapai 20.438,085 ha. Jika ditumpangsusunkan dengan data fungsi kawasan hutan, lahan kritis paling banyak berada di kawasan hutan lindung (9.379,436 hektare), hutan produksi (7.805,503 hektare), serta kawasan hutan konservasi (23,519 hektare). Jika dirincikan, lahan kritis di kawasan lindung tersebar di Kabupaten Bangka (1.309,1 hektare); Kabupaten Bangka Barat (1.264,9 hektare); Kabupaten Bangka Selatan (978 hektare); Kabupaten Bangka Tengah (1.247,4 hektare); Kabupaten Belitung (1.252,8 hektare); dan Kabupaten Belitung Timur (3.326,9 hektare). Sementara lahan kritis di kawasan hutan konservasi semuanya terapat di Kabupaten Belitung (23,52 hektare) (Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, 2022).

Penelitian ini akan berfokus pada salah satu wilayah sakral Suku Mapur, yaitu hutan larangan Gunung Cundong. Bagi Orang Mapur, kawasan ini disebut sebagai

gunung, meskipun tingginya hanya 288 mdpl. Gunung Cundong dengan luas 320 ha, merupakan bagian dari lanskap gunung Pelawan. Selain menjadi bagian dari ‘rahasia pelawan’, lanskap ini dipercaya Orang Mapur diperuntukkan khusus sebagai sumber kehidupan utama mereka di dunia (Teungku Sayyid Deqy, 2014). Kawasan hutan di Gunung Cundong menyimpan keanekaragaman hayati yang sudah mulai langka di Pulau Bangka. Dalam pemanfaatannya, beragam tumbuhan di Gunung Cundong juga digunakan dalam pengobatan tradisional Orang Mapur di Dusun Air Abik (Dodi, 2021). Selain itu, di Gunung Cundong juga terdapat sejumlah sumber mata air, salah satunya Air Duku yang mengalir hingga pemukiman Dusun Air Abik. Sementara di kaki Gunung Cundong, banyak dimanfaatkan masyarakat untuk behume, sebuah tradisi berkebun dengan menanam aneka tanaman pangan, seperti padi dan umbi-umbian. Dengan demikian, cukup logis jika Suku Mapur menganggap kawasan ini sebagai sumber kehidupan mereka di dunia, sehingga harus dijaga dan dilestarikan (Wijaya, 2022a).

Secara administratif, kawasan hutan Gunung Cundong masuk wilayah pemerintahan Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Secara simbolik, Dusun Air Abik merupakan imajiner terkuat peradaban Orang Mapur (Teungku Sayyid Deqy, 2014). Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengeksplorasi praktik pengelolaan terkait (misalnya larangan penebangan pohon, serta berbagai aturan adat terkait pembatasan pemanfaatan kawasan hutan) yang berpengaruh terhadap kelestariannya dari waktu ke waktu. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkontribusi pada pembentukan dan konservasi hutan larangan Gunung Cundong, serta mendeteksi setiap perubahan dalam interaksi sistem dan

hasilnya sepanjang waktu. Analisis ini relevan, karena akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana hubungan manusia-alam berubah, khususnya di daerah pedesaan. Ini juga berguna bagi pemangku kebijakan serta pengelola konservasi, karena dapat menunjukkan sejauh mana kepercayaan dan praktik pengelolaan tradisional dapat mendukung pendekatan konservasi alam (Dudley et al., 2009). Adapun periode waktu yang dipilih terbagi dalam tiga rezim pemerintahan di Indonesia, yaitu Orde Lama (1959-1966); Orde Baru (1966-1998); dan Reformasi (1998-hingga saat ini).

Untuk mencapai tujuan semua itu, penelitian ini menggunakan kerangka pikir sistem sosial-ekologi Ostrom (2009), untuk memodelkan proses sosial, ekologis, dan kelembagaan utama yang mengelola hutan larangan Gunung Cundong selama tiga periode waktu. Kerangka pikir ini merupakan alat analisis yang umum dan fleksibel yang membantu para ilmuwan untuk mengidentifikasi variabel paling penting beserta interaksinya, mendiagnosis hasil sistem pada berbagai tingkat dan skala (Ostrom & Cox, 2010). Sejauh ini, teknik analisis oleh Ostrom sudah pernah diterapkan oleh Marini Govigli et al., (2021), untuk menganalisis apa yang mendasari tindakan konservasi oleh masyarakat serta dinamika perubahan tata kelola hutan keramat Graviniti di Utara Yunani. Model tata kelola hutan larangan di Gunung Cundong dapat mendukung model kawasan hutan lindung awal, dalam hal memperkenalkan keberlanjutan jasa ekosistem sebagai respon terhadap tekanan antropogenik terhadap ekosistem alami. Dengan demikian, hutan larangan Gunung Cundong dapat dikonseptualisasikan sebagai CPR (Common-Pool Resource) atau sumber daya milik bersama, yang dapat terancam oleh eksploitasi atau

ditelantarkan, sehingga menyebabkan terganggunya bahkan kemusnahan sumber daya yang telah dijaga oleh Suku Mapur secara turun-temurun (Rutte, 2011).

1.2. Perumusan Masalah

Saat ini ada banyak Situs Sakral Alami yang tersebar di seluruh dunia, namun belum semuanya terdokumentasi, salah satunya hutan larangan Gunung Cundong yang disakralkan Suku Mapur di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Selain itu wilayah adat Suku Mapur dihadapkan pada berbagai ancaman antropogenik, mulai dari pertambangan, perkebunan skala besar, dan sebagainya. Di masa depan, bukan tidak mungkin aktivitas antropogenik ikut mengancam atau bahkan menghilangkan sejumlah wilayah sakral Suku Mapur, salah satunya hutan larangan Gunung Cundong. Sementara itu, model kawasan konservasi pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum efektif dalam menjaga kelestarian alam. Ini dibuktikan dengan masih adanya lahan kritis di kawasan lindung dan kawasan konservasi pemerintah. Peluang untuk memperkuat upaya konservasi ini ada pada sistem tata kelola hutan larangan Gunung Cundong oleh Suku Mapur. Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi fisik hutan larangan Gunung Cundong?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terancamnya hutan larangan Gunung Cundong?
3. Bagaimana dinamika tata kelola di hutan larangan Gunung Cundong?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk:

1. Menganalisis kondisi fisik hutan larangan Gunung Cundong;
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terancamnya hutan larangan Gunung Cundong;
3. Menganalisis dinamika tata kelola di hutan larangan Gunung Cundong.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

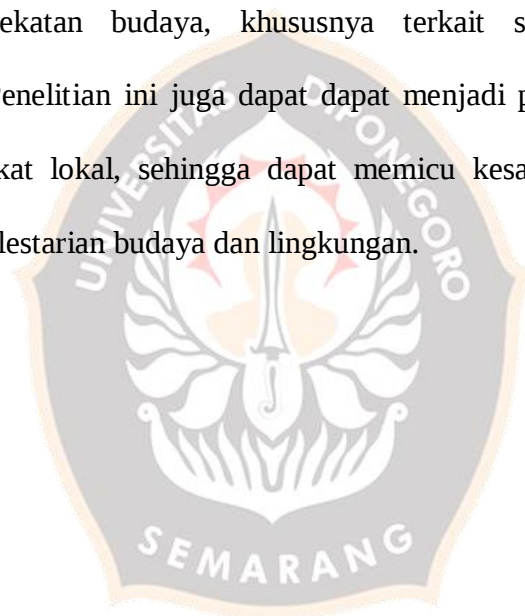
1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dengan penelitian ini diharapkan sebagai bentuk penerapan ilmu lingkungan, khususnya terkait upaya konservasi lingkungan berbasis masyarakat yang mendukung pengelolaan wilayah konservasi secara berkelanjutan. Penelitian ini juga mendukung bentuk penerapan ilmu lingkungan dan budaya terkait hubungan manusia dan lingkungan, serta mendukung dan memperkaya teori sosial-ekologi dalam dunia konservasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan referensi dari bidang antropologi, mengenai budaya masyarakat yang hidup harmonis dengan alam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan atau menyusun kebijakan terkait upaya pengembangan konservasi alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagi pihak swasta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam proses pembangunan atau pengembangan sebuah industri, agar dapat memperhatikan dan

menghormati wilayah sakral serta beragam pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sementara bagi para pegiat atau organisasi lingkungan, penelitian ini dapat berguna dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam sebuah proyek konservasi. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam berbagai penelitian lingkungan dan budaya, serta bagaimana mengintegrasikan keduanya. Ini juga dapat menjadi acuan bersama dalam merumuskan model konservasi dengan pendekatan budaya, khususnya terkait situs-situs sakral di masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan bersama bagi masyarakat lokal, sehingga dapat memicu kesadaran bersama akan pentingnya kelestarian budaya dan lingkungan.



SEKOLAH PASCASARJANA

1.5. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian yang terkait dengan topik penelitian atau praktik konservasi alam melalui pengkramatan hutan oleh masyarakat adat ataupun lokal, baik dalam skala Pulau Bangka hingga nasional sudah cukup sering dilakukan. Khusus di Pulau Bangka, penelitian dengan topik ini belum pernah dilakukan. Sementara dalam skala Indonesia, perbedaan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, objek penelitian, dan kerangka analisis sistem sosial-ekologi Ostrom yang digunakan peneliti. Semuanya disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu.

Penelitian Terdahulu di Indonesia									
No	Penelitian				Tujuan Penelitian				Hasil Penelitian
1.	Kearifan Lokal Sebagai Bentuk	Konservasi Tradisional Sumberdaya lokal masyarakat Desa Tamilou dan Sepa	Alam di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah (Wenno et al., 2021).	Mengetahui bentuk dan manfaat kearifan lokal masyarakat Desa Tamilou dan Sepa dalam menunjang konservasi sumberdaya hutan.					Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Negeri Sepa adalah dusung, sasi, tempat pamali, tempat keramat. Manfaatnya bagi konservasi berupa pentingnya perlindungan flora dan fauna untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian alam.

2.	Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah (Usop, 2020).	Mengeplorasi peran pahewan dalam kebudayaan Dayak dengan pendekatan semiotika.	Peran pahewan tidak hanya hutan suci (hutan keramat) tapi juga sebagai sebuah konservasi yang sesuai dengan konteks pelestarian hutan dan alam secara nasional dan global.
3.	Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sinapoy, 2018).	Mengeplorasi kearifan lokal masyarakat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Eksistensi keberadaan masyarakat suku Moronene tersebut dalam mengeksploitasi kekayaan alam hutan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai hanyalah untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara pengetahuan kearifan lokalnya yang didapatkan dari para "leluhurnya".
4.	Kearifan Lingkungan Sedulur Sikep Dalam Merespon Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng Utara Kabupaten Pati.	Menganalisis gerakan penolakan masyarakat Sedulur Sikep terkait rencana pembangunan pabrik semen di kawasan pegunungan	Kearifan lingkungan Sedulur Sikep yang memposisikan tanah atau bumi layaknya seorang ibu (ibu bumi) yang perlu dirawat, dihormati dan

	Kawasan Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Pati (Mojo et al., 2017).	dimulikan memberikan inspirasi gerakan menolak rencana pembangunan pabrik semen.
5.	Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air (Siswadi et al., 2011).	Menganalisis kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan mata air (Tuk Serco). Masyarakat mempersepsikan Tuk Serco sebagai karunia Allah yang sangat mendukung kehidupan mereka, dan dianggap sakral atau tidak boleh diganggu.
6.	Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal (Suparmini et al., 2013).	Mengetahui dan mengkaji upaya pelestarian lingkungan masyarakat Baduy yang tinggal dan berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kehidupan masyarakat Baduy di Kanekes memiliki integrasi yang sinergis dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, antara lain meliputi: (1) sistem pertanian, (2) sistem pengetahuan, (3) sistem teknologi, dan (4) praktik konservasi.

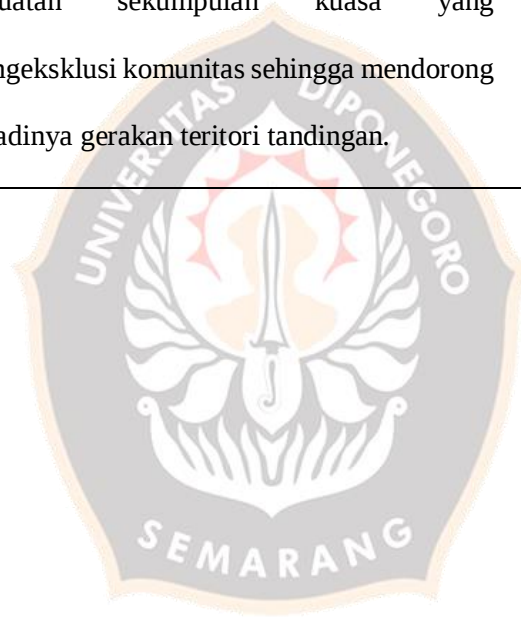
7. Peran Hutan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Stabilitas Iklim Satu Kajian Dalam Perspektif Deep Ecology (Kasus Masyarakat Desa Adat Tenganan, Bali) (Suryadarma, 2008).
- Memberikan tinjauan analitik peran Masyarakat Adat Tenganan turun temurun melalui mekanisme kelembagaannya telah mampu menjaga hutan dan stabilitas ekosistemnya.
- menjaga stabilitas iklim dalam menjalani kehidupannya.

Penelitian Terdahulu di Pulau Bangka

No	Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka (D. P. Rahayu, 2016)	Menganalisis cara membangun ecoliteracy untuk lingkungan berkelanjutan serta kearifan lokal tambang rakyat sebagai wujud ecoliteracy di Kabupaten Bangka.	Pembangunan ecoliteracy untuk lingkungan berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara meninjau kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal tambang rakyat berupa timah ampak merupakan unsur penting untuk membangun ecoliteracy di Kabupaten Bangka.

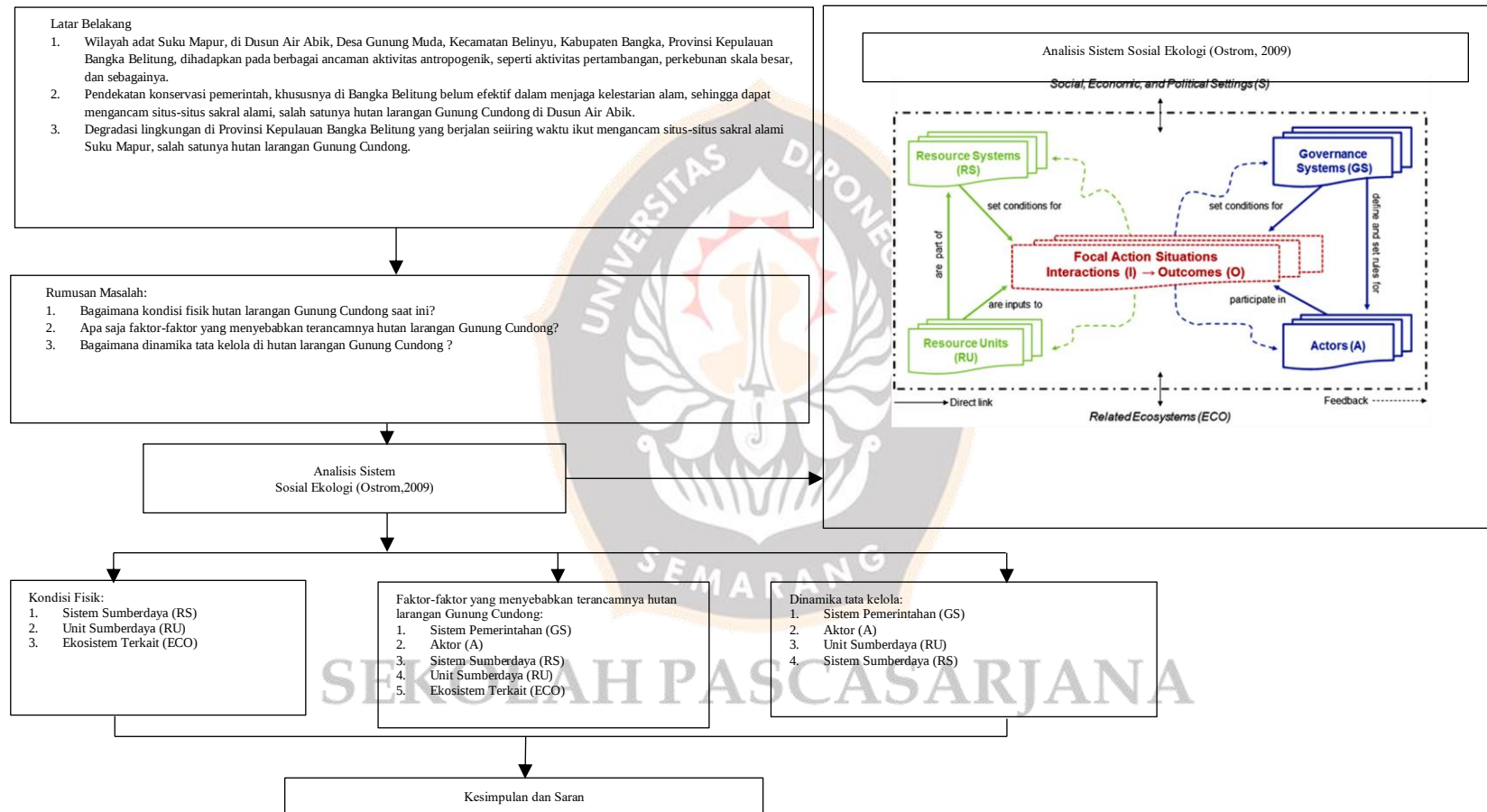
-
9. Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal Di Dusun Pejam Kabupaten Bangka (Cholillah, 2017). Mengetahui dan memberi gambaran bentuk pengelolaan hutan berbasis budaya setempat. Masyarakat lokal di Bangka Belitung masih memiliki pengetahuan yang baik tentang hutan. Target kebijakan dengan mempertahankan hutan adat sebagai titik tolak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Strategi pelestarian hutan adat berupa pengembangan industri pariwisata serta produk hasil hutan.
-
10. Korpus Mapur Dalam Islamisasi Bangka (Teungku Sayyid Deqy, 2014). Mengeksplorasi antropologi budaya, geneologi, dan historis, teologi, Suku Mapur. Sejumlah situs sakral menjadi topik pembahasan, namun belum menyinggung ranah ekologi serta konservasi alam, dan lebih berfokus pada studi sosial-antropologi, filologi, arkeologi sejarah dalam bingkai arus Islamisasi Pulau Bangka.
-
11. Akses dan Kekuasaan: Dilema Ekonomi Informal dan Eksklusi Menganalisis perbedaan penggunaan sekumpulan kuasa untuk mengakses sumber daya, keterkaitannya dengan tindakan komunitas adat ke sumber daya timah melalui sekumpulan kuasa identitas sosial (keturunan orang
-

Masyarakat Adat Mapur Bangka eksklusi dan dilema ekonomi informal pada adat), pengetahuan, teknologi, kapital, tenaga kerja, (Zulkarnain, 2021). komunitas adat, serta menginterpretasi dan hubungan sosial, tanpa disertai dengan otoritas kekuatan sekumpulan kuasa yang tidak memiliki kuasa untuk mengatur dan mengeksklusi komunitas sehingga mendorong mengontrol keberlanjutan akses terhadap sumber terjadinya gerakan teritori tandingan. daya.



SEKOLAH PASCASARJANA

1.6. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian. Variabel utama kerangka analisis SES Ostrom (2009) dibagi berdasarkan rumusan masalah.



SEKOLAH PASCASARJANA